

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Berikut adalah penelitian yang berkaitan dengan implementasi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan & Persamaan
1	Adino, I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku Umkm Terhadap SAK EMKM: Survey Pada Umkm Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Kompetif, 2(3), 84-94.	Variabel independen : Sosialisasi, tingkat pendidikan, skala usaha, umur usaha Variabel dependen : Pemahaman Pelaku Umkm Terhadap SAK EMKM	Dari hasil analisis ditemukan hasil bahwa Sosialisasi SAK EMKM dan Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemahaman mengenai Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM namun Skala Usaha dan Umur Usaha tidak berpengaruh terhadap Pemahaman Pelaku UMKM SAK EMKM.	Perbedaan : variabel umur usaha dan lokasi penelitian di Pekanbaru Persamaan : variabel dependen SAK EMKM

2	Rias Tuti dan S. Patricia Febrina Dwijayanti (2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	<p>Variabel independen : Lama Usaha, Latar Belakang Pendidikan, Jenjang Pendidikan, Ukuran Usaha, Pemberian Informasi dan Sosialisasi</p> <p>Variabel dependen : Pemahaman UMKM Dalam Menyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP</p>	<p>Hasil penelitian ini Lama Usaha Berpengaruh Sedangkan Latar Belakang Pendidikan dan Jenjang Pendidikan, Ukuran Usaha, Pemberian Informasi dan Sosialisasi Tidak Berpengaruh</p>	<p>Perbedaan : variabel dependen SAK ETAP</p> <p>Persamaan : variabel independen</p>
---	---	--	--	--

3	<p>Sholihin, M., & Tiswiyanti, W. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Di Kota Jambi (Studi Kasus Pada Umkm Batik Di Seberang Kota Jambi). Jambi Accounting Review (JAR), 1(3), 297-309.</p>	<p>Variabel independen : Sosialisasi, ukuran usaha, jenjang pendidikan, umur usaha dan pemahaman teknologi informasi</p> <p>Variabel dependen : Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm)</p>	<p>Sosialisasi, jenjang pendidikan, ukuran usaha, umur usaha dan pemahaman teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM batik di Seberang Kota Jambi. Secara parsial sosialisasi dan ukuran usaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM, sedangkan jenjang pendidikan, umur usaha dan pemahaman teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM.</p>	<p>Perbedaan : Variabel independen pemahaman teknologi informasi dan lokasi penelitian di Kota Jambi</p> <p>Persamaan : variabel dependen SAK EMKM</p>
---	--	---	--	--

4	Mardiana, M., Irwadi, M., & Sriyani, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Umkm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm Di Kecamatan Sanga Desa. Akuntanika , 7 (2), 88-96.	<p>Variabel independen : Pemberian informasi, latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, lama usaha, dan skala usaha</p> <p>Variabel dependen : Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Emkm</p>	<p>Hasil Berdasarkan penelitian diperoleh variabel Pemberian Informasi dan Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap Pengaruh terhadap UMKM SAK EMKM. variabel Latar Belakang Pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan karena taraf signifikansi Variabel Jenjang Pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan karena taraf signifikansi sebesar Variabel Lama Usaha tidak memiliki pengaruh signifikan karena taraf signifikansi Variabel Skala/Ukuran Usaha tidak memiliki pengaruh signifikan karena taraf signifikansi sebesar Pengaruh UMKM terhadap SAK EMKM</p>	<p>Perbedaan : Variabel independen pemberian informasi, lama usaha dan lokasi penelitian di Kecamatan Sanga Desa</p> <p>Persamaan : variabel dependen SAK EMKM</p>
---	---	---	--	--

5	Susilowati, M., Marina, A., & Rusmawati, Z. (2021). Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Persepsi Pelaku UMKM, Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Penerapan SAK EMKM Pada Laporan Keuangan UMKM Di Kota Surabaya. <i>Jurnal Sustainable</i> , 1(2).	<p>Variabel independen : Sosialisasi, persepsi, pemahaman</p> <p>Variabel dependen : Penerapan SAK EMKM Pada Laporan Keuangan UMKM</p>	<p>Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM dan sosialisasi SAK EMKM, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM.</p>	<p>Perbedaan : Variabel independen persepsi, pemahaman dan lokasi penelitian di Kota Surabaya</p> <p>Persamaan : variabel dependen SAK EMKM</p>
6	Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM: Survey pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. <i>Jurnal Akuntansi Kompetif</i> , 3(1), 34-42.	<p>Variabel independen : Sosialisasi, tingkat pendidikan, persepsi, pemahaman</p> <p>Variabel dependen : penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM</p>	<p>Hasil analisis menemukan bahwa sosialisasi dan pemahaman SAK EMKM tentang Pengusaha UKM memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan menurut SAK EMKM,</p>	<p>Perbedaan : Variabel independen persepsi, pemahaman dan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru</p> <p>Persamaan : variabel dependen SAK EMKM</p>

7	Silvia, B., & Azmi, F. (2019). analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pengusaha UMKM terhadap laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 17(1), 57-73.	Variabel independen : tingkat pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, lama usaha, omzet, pemberian informasi dan sosialisasi Variabel dependen : laporan keuangan berbasis SAK EMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi dan lama usaha tidak mempengaruhi persepsi pengusaha UMKM mengenai pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM	Perbedaan : Variabel independen pemanfaatan teknolog, lama usaha, omzet dan lokasi penelitian di Jepara Persamaan : variabel dependen SAK EMKM
---	--	---	---	---

9	Sulistyawati, S. A. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, pemberian informasi dan sosialisasi terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (studi kasus pada usaha kecil Kabupaten Tegal) (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).	<p>Variabel independen : tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, pemberian informasi dan sosialisasi</p> <p>Variabel dependen : Pemahaman SAK EMKM</p>	<p>Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.</p> <p>Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.</p> <p>Ukuran usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.</p> <p>Pemberian informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM</p>	<p>Perbedaan : Lokasi penelitian Kabupaten Tegal</p> <p>Persamaan : variabel dependen SAK EMKM</p>
---	--	---	--	--

Sumber : Jurnal penelitian terdahulu

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwasanya niat berperilaku (*behavioral intention*) tidak hanya dipengaruhi oleh sikap

terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) dan norma subyektif (*subjective norm*), namun juga dipengaruhi oleh kontrol berperilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*). Kontrol berperilaku yang dirasakan dipengaruhi oleh Pengalaman masa lalu dan perkiraan dari seseorang tentang sulit atau tidaknya untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Azwar, 2003).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* niat merupakan fungsi dari tiga determinan pertama yang bersifat personal kedua merefleksikan pengaruh sosial dan ketiga berhubungan dengan masalah kontrol Berikut ini adalah penjabaran dari variabel utama dari *Theory of Planned Behavior* yang terdiri dari :

a. Niat (*Intention*)

Niat merupakan komponen yang ada didalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu Niat memiliki peran yang khas dalam mengarahkan tindakan yaitu menjadi penghubung di antara pertimbangan mendalam yang diyakini dan diinginkan oleh seseorang dengan tindakan tertentu

Menurut *Theory of Planned Behavior*, seseorang dapat bertindak berdasarkan niatnya hanya apabila seseorang tersebut mempunyai kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2005). Teori ini tidak hanya menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia saja akan tetapi teori ini juga menekankan pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut.

b. Sikap Seseorang Terhadap Perilaku (*Attitude Toward Behavior*)

Teori ini memberikan penjelasan bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku didapatkan dari keyakinan terhadap konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh perilaku tersebut yang disebut dengan *behavioral beliefs* keyakinan terhadap perilaku Berdasarkan *Theory Of Planned Behavior* seseorang yang percaya bahwa menunjukkan suatu perilaku tertentu akan mengarahkan pada hasil positif yang akan mempunyai sikap *favorable* terhadap perilaku yang ditampilkan sedangkan orang yang percaya bahwa menampilkan tingkah laku tertentu akan mengarahkan pada hasil yang negatif maka ia akan memiliki sikap *unfavorable* (Ajzen, 2005). Secara umum sikap seseorang terhadap perilaku berkaitan dengan sikap dasar seorang *person in nature* yang berpengaruh terhadap *intense* berperilaku dan berhubungan dengan norma subjektif dan *perceived behavioral control*

c. Norma Subjektif (*Subjective Norm*)

Subjective Norms merupakan faktor dari luar individu yang berisi mengenai persepsi seseorang tentang apakah orang lain akan menyetujui atau tidak menyetujui suatu tingkah laku yang ditampilkan (Baron & Donn, 2000). Norma subjektif ditentukan sejauh mana keyakinan normatif (*normative belief*) dan keinginan untuk mengikuti (*motivation to comply*) (Ajzen, 2005). Dalam *Theory of Planned Behavior* norma subjektif juga identik dengan

keyakinan dari seseorang mengenai reaksi atau pendapat dari orang lain atau kelompok lain tentang apakah individu perlu harus atau tidak boleh melakukan suatu perilaku dan memotivasi individu untuk mengikuti pendapat orang lain tersebut (Michener dkk, 2004).

d. Persepsi Mengenai Control Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Perceived Behavioral Control memberikan gambaran mengenai kemampuan diri seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Hal ini juga dikemukakan oleh Ismail & Zain (2008), yaitu persepsi mengenai control perilaku merupakan persepsi individu mengenai kontrol yang dimiliki individu tersebut sehubungan dengan tingkah laku tertentu, serta ada atau tidak adanya faktor pendukung atau penghambat untuk dapat memunculkan perilaku. Persepsi mengenai control perilaku ditentukan dari pengalaman masa lalu seseorang dan juga dari perkiraan seseorang mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku. Persepsi mengenai control perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu *control beliefs* (kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan) dan *perceived power* (persepsi mengenai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku).

Theory of Planned Behavior mempelajari tentang sikap terhadap perilaku. Penentu terpenting dalam perilaku seseorang adalah niat untuk berperilaku, yaitu kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Seseorang akan menampilkan

suatu perilaku yang positif atau negatif untuk menunjukkan suatu perilaku tertentu sehingga memunculkan niat untuk berperilaku yang kemudian ditentukan oleh sikap. Selain itu ada juga faktor dari luar individu yang berisi persepsi dan keyakinan seseorang untuk menerima atau tidak tindakan yang dilakukannya. Apabila seseorang meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka seseorang tersebut akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. Teori ini juga mengemukakan kemampuan diri seseorang dalam melakukan suatu perilaku dari pengalaman masa lalu seseorang tersebut dan juga perkiraan seseorang mengenai seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan suatu perilaku yang bisa didapatkan informasinya dari orang lain juga (Nugroho, 2017)

Dewan Standar Akuntansi (DSAK) menyusun SAK EMKM dengan tujuan untuk mendorong dan juga memfasilitasi UMKM dalam kebutuhan melakukan pelaporan keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Didukung dengan adanya sosialisasi dan juga pelatihan dari pihak yang terkait dalam hal ini dapat mendorong UMKM untuk segera menggunakan SAK EMKM dalam melakukan penyusunan laporan keuangan usahanya. Kemudahan yang diberikan SAK EMKM dapat menimbulkan kepercayaan positif sehingga UMKM akan merasa termotivasi dan dapat menimbulkan persepsi mengenai betapa mudahnya untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM (Purwaningsih, 2018).

Hubungan antara *Theory of Planned Behavior* dengan penelitian ini yaitu apabila didalam diri UMKM sudah timbul niat untuk melakukan pembukuan dalam usahanya, dimana niat ini bisa timbul karena adanya pemberian sosialisasi mengenai manfaat yang akan didapatkan oleh UMKM apabila melakukan pembukuan. Jika niat sudah timbul dalam diri UMKM kemudian akan ada determinan sikap seseorang terhadap perilaku maka seseorang tersebut akan memiliki keyakinan untuk melakukan pembukuan, dimana keyakinan ini berkaitan dengan norma subjektif yang terdapat keyakinan seseorang untuk melakukan pembukuan serta keyakinan dalam menerapkan SAK EMKM . Bukan hanya itu apabila UMKM memiliki pengetahuan mengenai akuntansi pada masa lalu yang didapatkannya melalui latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan seperti yang dijelaskan pada salah satu determinan teori ini yaitu persepsi mengenai control perilaku, dimana kejadian dimasa lalu dan persepsi mengenai kemudahan dalam menyusun laporan keuangan akan meningkatkan implementasi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Adapun telah dijelaskan faktor mengenai persepsi control perilaku ditentukan oleh *control beliefs* (kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan) yang mana berkaitan dengan variabel penelitian yakni ukuran usaha, semakin besar tingkat ukuran usahanya, maka seseorang pelaku bisnis yang menekuni

bidang usahanya akan semakin meningkat pula kepercayaan dalam mengendalikan pengelolaan usahanya serta akan lebih memprioritaskan laporan keuangan, hal ini dikarenakan jika suatu usaha semakin lama dioperasikan dan skala usaha naik atau serta semakin meningkat maka kemungkinan besar penyediaan dan penyajian suatu informasi laporan keuangan juga akan meningkat . berdasarkan penjelasan tersebut, maka teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan keputusan individu dalam menentukan mau atau tidaknya memahami serta menerapkan SAK EMKM terhadap usahanya.

2.2.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi tentang SAK EMKM

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak , serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara & Sulastiningsih (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh oleh 24 pemilik UMKM. Tingkat pendidikan

meliputi SD, SMP sederajat, SMA sederajat, Diploma, Sarjana, magister. Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi penting bagi kesiapan untuk menghadapi tantangan global. Tingkat pendidikan yang telah ditempuh dan dimiliki oleh seseorang pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan untuk memperoleh kinerja yang baik

c. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan adalah bidang studi atau jurusan yang ditempuh oleh pelaku UMKM (Tuti & Dwijayanti, 2015). Diana (2011) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan merupakan bidang pendidikan yang telah diambil oleh pengusaha meliputi akuntansi, manajemen, ekonomi, atau lainnya. Julyanda & Rezeki (2018) menyatakan bahwa Latar belakang pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus. Pengertian latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal dalam mengambil kompetensi atau kejuruan.

Latar belakang pendidikan pelaku UMKM bisa mempengaruhi persepsi pelaku UMKM tersebut mengenai betapa pentingnya melakukan pembukuan dan juga pelaporan keuangan usahanya untuk pertumbuhan dan perkembangan usahanya. Pengetahuan tentang akuntansi, khususnya mengenai fungsi laporan keuangan diperoleh jika seseorang menjalani pendidikan akuntansi. Pengelola atau pemilik usaha yang memiliki latar belakang pendidikan

akuntansi dipercaya dapat mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap SAK EMKM dibanding dengan pengelola / pemilik usaha yang latar belakang tidak berasal dari jurusan akuntansi (Rudiantoro & Siregar, 2012).

d. Ukuran Usaha

Ukuran usaha merupakan ukuran dari perusahaan yang dapat diukur melalui jumlah tenaga kerja, aset perusahaan, volume penjualan, besarnya investasi serta lain-lain. Semakin besar Ukuran usaha, maka semakin banyak pula aktivitas perusahaan, yang ditandai dengan banyaknya pula jumlah karyawan. Ukuran usaha merupakan besarnya usaha dan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat jumlah tenaga kerja dan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.(Prawesti, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan perusahaan kedalam empat kategori skala usaha, yaitu : mikro,kecil,menengah, dan besar. Kecuali untuk perusahaan industry pengelolaan, kriteria yang digunakan adalah kriteria yang selama ini digunakan oleh BPS dan berdasarkan dengan berapa banyak jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan tersebut. Pengelompokan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sebagai berikut: skala usaha mikro <5 orang, skala usaha kecil 5-19 orang, skala usaha menengah 20-99 orang, skala usaha besar >100 orang.. Semakin

banyak jumlah karyawan maka semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga informasi akuntansi akan sangat dibutuhkan. Semakin besar skala usaha yang dimiliki maka akan semakin banyak pula langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan dan ini tentunya akan membutuhkan informasi akuntansi.

e. Sosialisasi SAK EMKM

Sosialisasi SAK EMKM merupakan suatu kegiatan sosialisasi yang didapat oleh para pengelola UMKM terkait SAK EMKM yang mana merupakan usaha yang dilakukan para pihak-pihak terkait yang bisa memberikan sosialisasi SAK EMKM misalnya dari Dinas Koperasi dan UKM, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ataupun lembaga lainnya (Rudiantoro & Siregar, 2012)

Berdasarkan pernyataan Dirdjosisworo (1985: 81), sosialisasi mengandung tiga pengertian penting, yaitu:

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses suatu individu mengambli cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya
2. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat di mana ia hidup, dan pola-pola nilai dan tingkah laku, sikap, dan kebiasaan serta ide-ide.
3. Segala sifat serta kecakapan yang telah dipelajari dalam proses sosialisasi itu dikembangkan serta disusun dimana digunakan sebagai suatu kesatuan dalam diri pribadinya. Pengertian

Sosialisasi Menurut Ritzer JR (1987:139) Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat.

2.2.3 Tinjauan atas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

2.2.3.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang tidak bertanggung jawab yang memerlukan laporan keuangan untuk mengembangkan usahanya. Dalam perekonomian Indonesia, segmen perusahaan terbesar terdiri dari UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didefinisikan sebagai:

- 1) Usaha Mikro adalah perusahaan produktif milik orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang menyelenggarakan usaha tersebut. kriteria. kecil seperti yang ditentukan oleh undang-undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi mandiri yang produktif dan dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih, atau pendapatan penjualan tahunan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ini.

2.2.3.2 Tujuan UMKM

Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada tahun 2016. SAK EMKM dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern yakni menginginkan usahanya terus berkembang, maka perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi, wujud pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan.

2.2.3.3 Kriteria UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual nyata yang berkaitan dengan operasi bisnis maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan

usahanya. Menurut ukuran perusahaan mereka, kualitas ini memisahkan pelaku usaha. UMKM dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

- 1) UMKM sektor informal adalah UKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah seperti pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM yang memiliki keterampilan pengrajin tetapi tidak memiliki dorongan kewirausahaan untuk mengembangkan operasinya.
- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kumpulan UMKM yang mampu berwirausaha melalui kolaborasi dan ekspor.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang disebut dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibagi menjadi :

- 1) Berdasarkan Modalnya
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- c) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha..

2) Berdasarkan omzetnya

- a) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta ribu rupiah).
- b) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).
- c) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.4 Pengertian SAK EMKM

Standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) disahkan pada tahun 2016 untuk entitas tanpa akuntabilitas publik sebagai mana didefinisikan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK

ETAP) yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya-tidaknya dalam 2 tahun.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan
- b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Sedangkan entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan, jika

:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b) Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai pengalihan hak kepemilikan untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria di atas, hanya jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016).

2.2.5 Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Menurut SAK EMKM, tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa saja yang tidak mampu untuk meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pengguna ini termasuk penyedia sumber daya bisnis seperti kreditur dan investor. Dalam memenuhi tujuan, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Pos-pos yang akan muncul dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. Berikut ini penjelasan masing-masing pos dalam laporan keuangan SAK EMKM

1. Aset

Asset adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud. Aset diakui dalam laporan keuangan ketika manfaat ekonominya ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat ditentukan dengan andal, maka aset tersebut dicatat sebagai aset dalam

laporan keuangan. Jika manfaat ekonomi suatu aset dianggap diragukan, hal itu tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang terutang oleh seseorang atau perusahaan, yang biasanya berbentuk sejumlah uang. Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

3. Penghasilan

Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi

dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Beban adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak pada

laporan laba rugi. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara handal

Berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan minimum, meliputi :

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan lengkap bahwa entitas menyajikan minimum dua periode untuk laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bila perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan :

1. Nama entitas
2. Tanggal akhir periode
3. Rupiah sebaga mata uang penyajian

Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

2.2.6 Contoh Laporan Keuangan SAK EMKM

Berikut ini merupakan contoh laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8			
ASET	Catatan	20X8	20X7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		xxx	xxx
Piutang usaha	7	xxx	xxx
Persediaan	6	xxx	xxx
Beban dibayar dimuka		xxx	xxx
Akumulasi penyusutan		xxx	xxx
<i>Jumlah Aset</i>		xxx	xxx
LIABILITAS		xxx	xxx
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS		xxx	xxx
Modal		xxx	xxx
Laba tahun berjalan (defisit)	9	xxx	xxx
<i>Jumlah Ekuitas</i>		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS		xxx	xxx

Gambar 2.1 Contoh Laporan Keuangan Entitas Berdasarkan SAK EMKM

Sumber : SAK EMKM, 2020

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7			
PENDAPATAN	Catatan	20X8	20X7
Pendapatan usaha	10		
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
<i>Jumlah pendapatan</i>		xxx	xxx
BEBAN	11	xxx	xxx
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain		xxx	xxx
<i>Jumlah beban</i>		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SESUDAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Gambar 2.2 Contoh Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM

Sumber : SAK EMKM, 2020

ENTITAS
CATATAN LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20X8

1. UMUM

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notary di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xx, Jakarta Utara.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pertanyaan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecl, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Kas kecil Jakarta – Rupiah xx	xx	xx
4. GIRO		

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
PT Bank xxx - Rupiah		
	xx	xx
5. DEPOSITO		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
PT Bank xxx - Rupiah	xx	xx
Suku Bunga - Rupiah	4,50 %	5,00 %
6. PIUTANG USAHA		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Toko A	xx	xx
Toko B	xx	xx
Jumlah	xx	xx
7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Sewa	xx	xx
Asuransi	xx	xx
Lisensi dan perizinan	xx	xx
Jumlah	xx	xx
8. UTANG BANK		
<p>Pada tanggal 4 Maret 20X8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.</p>		
9. SALDO LABA		
<p>Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.</p>		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Penjualan	xx	xx
Retur Penjualan	xx	xx
Jumlah	xx	xx
11. BEBAN LAIN-LAIN		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Bunga pinjaman	xx	xx
Lain-lain	xx	xx
Jumlah	xx	xx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Pajak Penghasilan	xx	xx

Gambar 2.3 Contoh Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK EMKM

Sumber : SAK EMKM, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Implementasi UMKM Cafe berbasis SAK EMKM

Pelaku usaha yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, akan memiliki tingkat implementasi mengenai SAK EMKM yang lebih tinggi pula. Hal ini dikarenakan pelaku usaha tersebut akan lebih mudah memahami mengenai betapa pentingnya melakukan pembukuan dan juga melakukan pelaporan keuangan mengenai usaha yang sedang dijalankannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memudahkan seseorang untuk menyerap informasi mengenai SAK EMKM dan menerapkannya.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Adino (2019), Diana (2018), Purwaningsih (2018), dan Haryani (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap implementasi pelaku UMKM tentang SAK EMKM. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula implementasi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

2. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Implementasi UMKM Cafe berbasis SAK EMKM

Pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan memiliki tingkat implementasi mengenai SAK EMKM yang lebih tinggi.

Hal ini dikarenakan pada saat menempuh pendidikan, pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi khususnya pengetahuan mengenai laporan keuangan dan manfaat yang didapatkan apabila menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dalam usaha yang dirintisnya. Pelaku UMKM yang mempunyai latar belakang ekonomi akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM karena pelaku UMKM telah mampu untuk membuat laporan keuangan yang kemudian disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu SAK EMKM.

Hasil penelitian mardiana (2021) menyatakan bahwasanya latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap implementasi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Perihal ini dapat disimpulkan bahwasanya pelaku UMKM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi akan mempunyai implementasi yang lebih baik daripada pelaku UMKM yang latar belakang pendidikannya tidak berasal dari akuntansi.

3. Pengaruh ukuran Usaha Terhadap Implementasi UMKM Cafe berbasis SAK EMKM

Ukuran usaha berpengaruh terhadap implementasi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Semakin besar ukuran usaha akan dibutuhkan pencatatan akuntansi yang semakin rumit pula. Pemilik usaha membutuhkan pedoman pencatatan yang dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar yaitu

SAK EMKM. Semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM, persepsi pelaku usaha akan semakin memandang penting atau tidaknya kebutuhan untuk melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Intan Adino (2019), M. Sholihin (2020), menjelaskan bahwasanya ukuran usaha berpengaruh terhadap implementasi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Artinya semakin besar ukuran usaha yang dimiliki pelaku UMKM maka akan semakin tinggi pula implementasi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

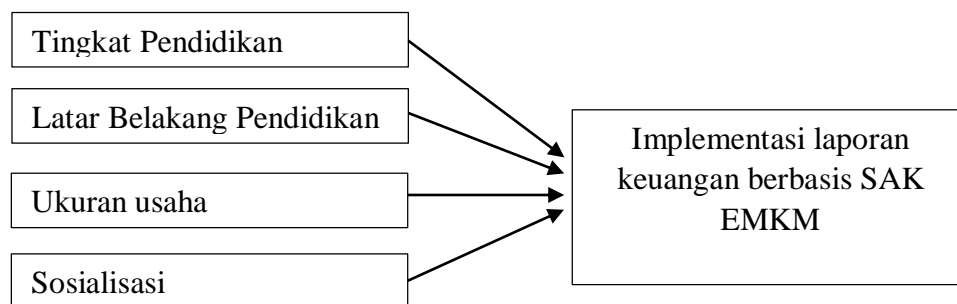
4. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Implementasi UMKM Cafe berbasis SAK EMKM

Pengaruh sosialisasi terkait implementasi SAK EMKM akan memberi manfaat pada pengelola UMKM, karena pengelola UMKM akan mampu memahami pentingnya pembukuan berdasarkan SAK EMKM untuk keberlangsungan usahanya. Jika tidak diadakan sosialisasi tentang SAK EMKM akan berakibat peengelola UMKM takut untuk mengaplikasikannya, karena keengganan pelaku usaha dalam mengambil resiko dalam mengubah tatanan keuangan yang sudah ada sedari awal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Viola (2018), Intan Adino (2019), St Salmiani (2021) menyatakan sosialisasi SAK EMKM terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Sosialisasi merupakan proses belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu dan bagaimana mengkoordinasikan perilakunya

terhadap perilaku orang lain serta belajar sesuai dengan peranan dan peraturan yang ditetapkan (Badria & Diana, 2018)

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara (pendugaan) terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2012:93).

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 :Variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

H2 :Variabel latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

H3 :Variabel ukuran usaha berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

H4 :Variabel sosialisasi berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.